Ridwan Kamil Kepincut MotoGP 2021 di Mandalika

https://travel.dream.co.id

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sepakat bekerja sama dalam sejumlah sektor, mulai ekonomi kreatif (ekraf), pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, serta pendidikan hingga 2023 mendatang.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Gedung Graha Bakti Praja, Kota Mataram, Kamis (17/12/2020). (Baca Juga: Gubernur NTB: Kami Siap Tingkatkan Sinergi dengan MNC Media)

Ridwan Kamil menyatakan, tujuan kerja sama tersebut, yakni mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam momentum tersebut, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil kepincut dengan event MotoGP yang rencananya bakal digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok.

Menurutnya, event internasional tersebut bukan hanya kebanggaan NTB saja, melainkan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. “Momentum MotoGP 2021 yang akan diselenggarakan di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah itu bukan hanya kebanggaan NTB saja, tapi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, maka hukumnya wajib semua yang mencintai kesuksesan itu mendukung provinsi NTB," ungkap Kang Emil dalam keterangan resminya, Jumat (18/12/2020).

Sumber Berita:

1. https://daerah.sindonews.com/read/273124/701/ridwan-kamil-kepincut-motogp-2021-di-mandalika-1608289924?showpage=all
2. https://www.matain.id/article/10014/2020/1219/ridwan-kamil-kepincut-motogp-2021-di-mandalika.html
3. https://travel.tempo.co/read/1416102/ridwan-kamil-dukung-ntb-tuan-rumah-motogp-sampaikan-pantun-kerudung-sulam#:~:text=Gubernur%20NTB%20periode%201968%20%2D%201979,berasal%20dari%20Tasikmalaya%2C%20Jawa%20Barat.&text=Ridwan%20Kamil%20menambahkan%2C%20MotoGP%20Mandalika,Indonesia%20mendukung%20NTB%2C%22%20ucapnya.
4. https://lombokpost.jawapos.com/ntb/19/12/2020/jabar-ntb-jalin-kerja-sama-di-sejumlah-sektor/

Catatan:

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, Gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma sebagai Gubernur kedua. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (Pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi.

Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian

dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menjadi Gubernur NTB yang ke empat menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998. Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si (Gubernur NTB ke lima) berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB sebagai Gubernur NTB ke enam. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Selanjutnya sesuai dengan perkembangfan zaman dan perkembangan politik, masyarakat NTB menitipkan amanah untuk memimpin pembangunan Daerah kepada Gubernur ke tujuh yaitu TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Bapak Ir. Badrun Munir, MM yang memperjuangkan visi NTB bersaing beriman dan berdaya saing dan atas keberhasilan memimpin pada priode pertama masyarakat NTB kembali mempercayakan kendali pemerintahan ke 2 kalinya pada Bapak DR. TGH. M. Zainul Majdi sebagai Gubernur dan Bapak H. Muhammad Amin, SH, M.Si sebagai Wakil Gubernur pada priode tahun 2013-2018 melalui visi misi terwujudnya NTB yang beriman berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam usianya yang ke-60 Provinsi NTB kini dipimpin oleh pasangan putra dan putri terbaiknya yaitu Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Dr Hj.Siti Rohmi Djalilah.[1]

[1] https://www.ntbprov.go.id/profil-daerah#:~:text=NTB%2C%20secara%20resmi%20mendapatkan%20status,menjadi%20Gubernur%20pertamanya%20adalah%20AR.